

# BEBERAPA HAL TENTANG KAJIAN SEJARAH SOSIAL-EKONOMI INDONESIA: SEBUAH SURVAI

*Soegijanto Padmo<sup>1)</sup>*

## 1. Pengantar

Sampai dengan awal kemerdekaan Indonesia, buku-buku tentang sejarah Indonesia pada umumnya ditulis oleh penulis bangsa Belanda (misalnya karya Eijkman dan Stapel, 1933; Fruin-Mees, 1922). Para penulis karya tersebut pada umumnya berpandangan *Neerlando-sentris*. Oleh karena itu, uraian yang dihasilkan adalah semata-mata menceritakan petualangan bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda, di dunia Timur. Sangat sedikit cerita tentang bangsa Timur dijumpai dalam karya tersebut. Apabila ada cerita tentang bangsa Timur itu, hal itu karena keterlibatannya dengan kepentingan bangsa Eropa, baik sebagai pembantu yang baik maupun musuh mereka dalam berpetualang. Namun, satu karya monumental yang lain dari tema yang lazim pada waktu itu ialah karya Van Leur (1955), yang menempatkan peranan penting masyarakat pedagang di Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi sejak sebelum kedatangan bangsa Eropa.

Di samping karya bangsa Belanda yang *Neerlando-sentris*, ada karya tradisional berupa babad, tambo, atau hikayat. Berbeda dengan karya bangsa Belanda, karya tradisional ini berisi kisah pergantian tahta, perebutan kekuasaan, dan kepahlawanan. Oleh karena itu, kisah-kisahannya berkisar pada masalah politik dan hampir tidak ada cerita tentang rakyat kebanyakan (misalnya *Babad Tanah Jawi*, *Sejarah Melayu*, dan *Hikayat Raja-Raja Pasai*). Meskipun demikian, penulis Indonesia telah mulai melakukan tinjauan kritis terhadap karya tradisional tersebut sebagaimana dilakukan oleh Husein Djajadiningrat (1950).

Karya Van Leur dan Husein Djajadiningrat tersebut, menurut hemat penulis, merupakan tonggak penting bagi proses berkembangnya gagasan penulisan sejarah dari dalam atau *from within*. Sebagaimana terlihat sejak dasawarsa 1960-an, karya sejarah sosial-ekonomis muncul dan berkembang dengan pesat, seperti akan dibicarakan nanti. Dalam makalah ini dibicarakan proses munculnya penulisan sejarah sosial-ekonomis di Indonesia serta beberapa dimensi yang berkaitan dengan hal itu, misalnya, aspek teoretis serta kemungkinan mengembangkan kajian sejarah sosial-ekonomi pada masa depan.

## 2. Perkembangan Kajian Sejarah Indonesia Sejak 1950-an

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kajian sejarah Indonesia masa mutakhir cenderung didominasi oleh penulis yang menekankan tema politik dan kebudayaan. Dirasa perlu untuk menerangkan perkembangan pada masa kolonial yang mendasari beberapa kejadian penting yang dialami oleh bangsa Indonesia yang baru saja merdeka. Oleh karena itu, karya peneliti seperti Kahin (1952) tentang nasionalisme, Benda (1958) tentang Islam, serta McVey (1965) tentang komunisme berusaha dengan cara yang berbeda-beda memberikan latar belakang pada pemahaman kita terhadap kekuatan politik utama di Indonesia pada kurun 1950-1965. Karya semacam itu adalah perlu dan beberapa di antaranya ditulis dengan baik. Akan tetapi, dengan menekankan kegiatan politik di tingkat nasional dan niat untuk mencakup wilayah secara nasional serta kurun waktu yang sedemikian

<sup>1)</sup> Makalah disiapkan untuk disampaikan pada diskusi yang diselenggarakan Keluarga Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam rangka kegiatan hari Kebangkitan Nasional, Selasa, 25 Mei 1993.

panjang, penulis tersebut (serta penulis serupa lainnya) cenderung untuk memfokuskan pada kisah beberapa tokoh, yang mempunyai peranan terpenting dalam gerakan. Karya tersebut tidak banyak menceritakan massa rakyat atau tentang perubahan yang terjadi pada tingkat lokal atau daerah.

Usaha untuk menyoroti lebih banyak pada lapisan masyarakat tingkat bawah dan membawa mereka ke panggung sejarah Indonesia telah dilakukan oleh Sartono (1966) dalam karyanya tentang pemberontakan petani di Banten dan keresahan agraris di pedesaan Jawa (1973), serta dalam karya Benda dan Lance Castle (1969) tentang gerakan orang Samin. Karya tentang pemberontakan petani ini merupakan sumbangan penting pada historiografi Indonesia karena buku tersebut menjembatani jurang antara sejarah umum atau sejarah politik dan sejarah lokal yang bercorak sosial-ekonomi yang mulai muncul pada awal dasawarsa 1970-an.

Sekitar tiga dasawarsa yang lalu satu dimensi baru mulai terbuka di Indonesia dalam kajian ilmu-ilmu sosial ketika sekelompok sejarawan dan ilmuwan sosial melaksanakan penelitian tentang sejarah sosial-ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, Onghokham (1975) dengan karyanya tentang Madiun, Elson (1984) tentang Pasuruan, Kuntowijoyo (1980) tentang Madura, Fernando (1982) tentang Cirebon, serta Roger Knight (1983) tentang Pekalongan. Perkembangan ilmu-ilmu sosial di Indonesia juga membawa pemahaman kita yang lebih baik terhadap masyarakat pedesaan. Fokus perhatian pada kajian sejarah serta studi sosial-ekonomi tentang Indonesia sungguh merupakan suatu perkembangan yang melegakan. Studi yang terakhir itu memusatkan perhatiannya pada peranan massa rakyat dalam proses sosial-ekonomis yang terjadi pada tingkat bawah. Peranan pihak luar yang penting hanya dibicarakan tidak semata-mata demi kepentingan mereka, namun sepanjang keberadaan mereka berkaitan dengan kepentingan masyarakat pedesaan yang sedang diteliti.

Dengan fokus perhatian yang semakin dekat dengan masyarakat pedesaan, sejarah sosial-ekonomi di tingkat lokal menjadi semakin atraktif serta semakin terbuka disebabkan, antara lain, karena semakin terbukanya sumber arsip, terutama di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dokumen

yang bisa diperoleh di sana meliputi berbagai aspek sejarah sosial-ekonomi suatu wilayah karesidenan tertentu. Lebih dari itu, beberapa kesimpulan atau asumsi yang diperoleh pada jenis kajian sejarah politik sebelumnya sekarang dipertanyakan oleh temuan sejarawan sosial-ekonomi. Sudah barang tentu, pluralitas sosial-budaya masyarakat Indonesia serta kondisi geografis maupun pengalaman sejarah yang berbeda memainkan peranan penting dalam menentukan respons masyarakat setempat terhadap tekanan dan campur tangan tertentu. Hal itu terlihat misalnya dalam karya Frederick (1978) tentang Surabaya dan karya O'Malley (1977) tentang Yogyakarta dan Sumatra Timur pada masa Depresi 1930-an, yang menunjukkan bahwa jalan yang diambil kaum nasionalis di daerah tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi setempat dan pribadi tertentu daripada yang digambarkan dalam karya konvensional. Demikian pula, teori Geertz Involusi Agraria (1963), setelah berhasil menciptakan pengaruh sedemikian besar kepada para peneliti selama beberapa tahun, telah dipertanyakan pada berbagai aspek oleh penulis yang melakukan penelitian secara cermat di berbagai daerah, terutama Elson (1982) tentang industri gula di Pasuruan, Kuntowijoyo (1980) tentang perubahan sosial di Madura, dan Fernando (1982) tentang tanaman kopi di Karesidenan Cirebon.

### 3. Ekonomi Perkebunan di Tengah-tengah Kajian Sejarah Sosial Ekonomi

Membicarakan sejarah sosial-ekonomi di Indonesia pada hemat penulis tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang ekonomi perkebunan. Politik ekonomi pemerintah kolonial selama abad XIX dan XX yang bergeser dari politik dagang ke politik produksi telah menyeret penduduk pribumi dalam tata ekonomi dunia. Dalam proses tersebut, penduduk pribumi yang memiliki tanah dan tenaga kerja dipadukan dengan modal dan keterampilan yang dibawa oleh bangsa Eropa. Interaksi antara faktor tersebut mewarnai dinamika perkembangan yang terjadi pada sejarah sosial-ekonomi di Indonesia.

Tidak bisa dibantah bahwa industri perkebunan besar telah memainkan peranan penting dalam perekonomian di Hindia pada kurun 1830-1940, suatu periode ketika perubahan penting terjadi dalam hal pola

tanam, metode organisasi produksi, dan lokasi kebun. Bahkan, istilah *plantation* (yang digunakan secara bergantian dengan istilah *estate*) telah berubah secara drastis antara pertengahan abad XIX dan pertengahan abad XX, baik dalam hal luasan areal tanam (yang semula hanya sekitar 50-150 bau menjadi ribuan hektar untuk kebun karet di Sumatra Timur) dan struktur organisasi, yang semula merupakan perusahaan perseorangan atau keluarga menjadi organisasi raksasa seperti HVA, Deli Mij, atau NV. Klattensche Cultuur-Maatschappij.

Boeke (1948: 79) memberikan definisi perkebunan sebagai "suatu kompleks perusahaan, unit-unit teknis, yang seringkali dilengkapi dengan petugas administratif dan ekspor". Ia sebenarnya hanya memberikan definisi perkebunan semata-mata dari segi teknis dan efisiensi organisasi, tanpa menyebutkan tentang ketersediaan tenaga kerja atau kaitannya dengan masyarakat di sekitarnya. Boeka semata-mata melihat perkebunan sebagai lembaga yang tidak ada hubungan dengan masyarakat sekitarnya, atau suatu lembaga yang sama sekali terpisah atau *enclave* perusahaan yang dualistik, yang dibangun terasing dari pedesaan sekitarnya. Situasi semacam itu tidak dijumpai di perkebunan tembakau Vorstenlanden di daerah Yogyakarta dan Surakarta, ataupun perkebunan tembakau cerutu di Besuki. Hal serupa terbukti di perkebunan tebu yaitu bahwa adahubungan yang erat antara pabrik gula dengan desa sekitarnya.

Sistem Tanam Paksa (STP) lazim dianggap sebagai awal dari sisten perkebunan yang dikembangkan bangsa Belanda. Meskipun STP beroperasi dengan sistem perkebunan hanya pada tanaman tebu, sama sekali tidak dilaksanakan pada perusahaan tanaman penting seperti kopi. Di bawah STP, produksi gula menandai permulaan perkembangan pola baru dari perusahaan perkebunan dengan skala luas. Karena perkebunan tebu dan pabrik gula merupakan suatu bentuk produksi skala besar yang berdasarkan pada mesin besar dan biaya tinggi, hal ini melibatkan penguasaan tanah luas dan tenaga kerja yang banyak oleh pabrik gula. Setelah 1870, ciri serupa bisa disaksikan pada perusahaan swasta Belanda (atau perusahaan swasta asing lainnya) yang mengusahakan tanaman tembakau, karet, teh, dan pada derajat tertentu kopi. Perusahaan indigo dan kopi pada STP, tidak dilaksanakan dalam bentuk per-

kebunan, namun lebih merupakan suatu tanaman wajib yang harus diusahakan oleh penduduk dengan pengawasan pegawai Belanda. Pengusahaan tanaman kopi pada STP tidak berbeda dengan *Preanger stelsel* pada abad XVIII, kecuali pengawasan oleh *opziener* menjadi lebih ketat setelah 1830. Akan tetapi, kegiatan tersebut lebih merupakan tugas *bupati*, *wedono*, dan *demang* yang mengorganisasi pengusahaannya dan bukan pejabat Belanda, perusahaan tertentu, atau perkebunan. Kopi diproduksi dalam kebun skala kecil yang dimiliki dan diusahakan oleh petani, bukan oleh pengusaha Belanda. Kebun kopi ini berbeda dengan perusahaan perkebunan skala besar yang diterapkan pada perkebunan tebu dan tembakau pada masa kemudian. Meskipun demikian, justru tanaman kopilah, bukan gula, yang menghasilkan pemasukan uang dengan jumlah besar bagi keuangan negara penjajah pada masa awal STP. Hanya setelah 1850-1860-an gula mulai menggantikan kopi sebagai sumber pemasukan negara yang utama. Pelaksanaan STP pada indigo tidak berhasil dalam menjadikan sumber pemasukan bagi negara, demikian pula tanaman teh dan tembakau (Fasseur, 1986: 119-120).

Dari beberapa tanaman yang diusahakan dalam STP, kopi bukanlah tanaman baru, sedangkan tanaman lain seperti tembakau, tebu, dan indigo bukanlah tanaman baru di beberapa daerah meskipun di beberapa daerah lain adalah tanaman asing bagi petani. Tanaman tersebut diusahakan terutama di tanah petani milik petani atau di tanah yang disebut tanah partikelir. Kopi diusahakan di tanah yang terletak di lereng bukit atau di pekarangan milik petani di bawah perintah penguasa setempat serta di bawah pengawasan pegawai Belanda. Pabrik gula biasanya mengadakan kontrak dengan petani untuk menanam tebu, untuk diserahkan kepada pabrik gula yang didirikan oleh kontraktor Belanda. Ketika pengusaha tembakau swasta muncul pada 1850-an di Besuki, mereka menyewa tanah pada penguasa lokal (atau kepada penguasa di Batavia), tetapi mereka tetap mengandalkan pada petani untuk mengusahakan tembakau. Di daerah kerajaan, sistem *apanage* memberikan kesempatan pekebun untuk memperoleh tanah dan tenaga kerja lewat kontrak dengan penguasa lokal (*apanage houder*).

Segera setelah pengusaha swasta diizinkan untuk beroperasi secara ekstensif dalam produksi perkebunan setelah Undang-undang Agraria 1870, daerah operasi perusahaan perkebunan bertambah dengan pesat dan kegiatan mereka ternyata jauh lebih menguntungkan, kecuali pada masa resesi 1884-1885. Jutaan gulden diperoleh pekebun maupun perusahaan swasta sebagai keuntungan serta sejumlah besar uang dikirim ke negeri Belanda. Transisi dari perusahaan yang dimiliki pribadi atau keluarga menjadi perusahaan raksasa atau *corporate plantation system* (Geertz, 1963; 50) pada 1860-1870-an mempunyai efek yang penting atas ekonomi petani sebagai akibat dari dibayarkannya upah berupa uang oleh perusahaan perkebunan.

Perluasan perusahaan perkebunan dan pengusaha tanaman perdagangan berlangsung antara 1870 dan 1920an, terutama untuk tanaman tembakau dan tebu di Jawa dan kemudian tanaman karet dan kelapa sawit di Sumatra. Pada kurun ini, industri perkebunan mengalami perluasan yang cepat, meskipun kemunduran terjadi setelah resesi 1884-1885, dengan pemulihan secara bertahap yang dicapai pada 1890-an. Ekspansi ini berlanjut sampai pecahnya PD I, tetapi sejak 1915 sampai 1919, produksi beberapa tanaman, seperti tembakau cerutu Vorstenlanden, jatuh hampir mencapai titik nol karena kesulitan pengiriman produksi tembakau ke pasar dunia. Perluasan usaha pada saat itu disebabkan terutama oleh dua hal yaitu penyediaan modal lewat bank perkebunan-*cultuur banken* serta permintaan yang kuat di pasar dunia. Situasi ini mengakibatkan perusahaan menanamkan modalnya pada berbagai jenis usaha di Hindia Belanda, terutama pada 1890 sampai 1910, yang menimbulkan kompetisi semakin ketat di antara mereka. Pada situasi yang penuh dengan kompetisi seperti itu, semua perusahaan perkebunan di Hindia Belanda memerlukan suatu sistem ekonomi yang murah dan sistem upah yang rendah perlu diciptakan oleh pemerintah kolonial dalam politik kolonialnya.

#### 4. Aspek Teoretis

Tentang pentingnya teori dalam studi sejarah terdapat ketidaksepakatan di antara sejarawan. Paling tidak ada dua kelompok: kelompok pertama, mereka menganggap

bahwa sejarawan harus menguasai teori terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian; kelompok kedua, mereka menganggap bahwa teori tidak harus dikuasai terlebih dahulu oleh sejarawan sebelum melakukan penelitian. Terlepas dari adanya ketidaksepakatan itu, penulis berpendapat bahwa sebenarnya ketidaksepakatan itu bukan pada perlu tidaknya teori atau konsep, tetapi pada kapan teori atau konsep itu diperlukan oleh peneliti. Jadi, perbedaan itu terletak pada kapan kita memerlukan konsep atau teori ilmu-ilmu sosial lain.

Sebagaimana diketahui bahwa secara teoretis-metodologis setiap peneliti memerlukan konsep atau teori dalam melakukan penulisan yaitu dalam merangkai sejumlah fakta yang telah dikumpulkan. Konsep atau teori itu diperlukan sejarawan dalam melakukan narasi sehingga apa yang dikemukakan bukan sekedar menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana, tetapi juga mengapa dan bagaimana.

Hal penting lainnya yang perlu diingat adalah bahwa tidak semua teori yang dikembangkan oleh peneliti Barat cocok untuk kondisi Indonesia. Teori tersebut dibangun berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah tertentu, misalnya Amerika Latin dan Afrika, yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda dengan daerah Asia, khususnya Indonesia. Sifat kritis yang harus diambil oleh sejarawan adalah bukan menolak untuk menggunakan teori Barat, namun ia harus bisa menunjukkan bahwa teori tersebut mengandung kelemahan pada aspek tertentu serta menunjukkan aspek lain yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia. Inilah sumbangan penting sejarawan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat internasional. Misalnya, bagaimana teori ketergantungan yang diketengahkan oleh Frank (1967) dianggap bisa menerangkan gejala perkembangan masyarakat di dunia ketiga. Di kalangan penganut paham Neo-Marxist, teori Frank juga mendapat kecaman (Lebih jauh diskusi tentang teori ketergantungan bisa dilihat pada Mandle (1972) dan Soegijanto-Padmo, 1993).

#### 4. Beberapa Karya tentang Ekonomi Perkebunan

Ekonomi perkebunan di Hindia Belanda telah menarik perhatian berbagai ahli ilmu-ilmu sosial dan sejarawan yang telah mene-

liti berbagai aspek yang berbeda sistem sosial Indonesia pada masa penjajahan. Penelitian yang dilakukan oleh ahli ilmu-ilmu sosial seperti Allen dan Donnithorne (1968), dan Barlow (1984) telah mencoba untuk membandingkan antara pertumbuhan perusahaan perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Penulis lain seperti Thee Kian-wie (1977), Pelzer (1978), Stoler (1985), dan O'Malley (1977) telah menulis secara luas tentang perkembangan daerah perkebunan terpenting di Indonesia yaitu Sumatra Timur pada masa kolonial. Perkebunan tebu di Jawa telah diuraikan secara singkat oleh Allen dan Donnithorne (1968) dan Geertz (1963) maupun Elson (1982), Knight (1983), dan Fernando (1982) di daerah tertentu. Meskipun demikian, belum pernah ada usaha untuk menulis sejarah perkebunan yang komprehensif.

Penelitian Allen dan Donnithorne (1968), yang dilaksanakan pada awal dasawarsa 1950-an merupakan salah satu karya terpenting tentang sejarah perkembangan perusahaan Barat di Indonesia dan Malaya. Tujuan penelitian itu adalah mengkaji perkembangan perusahaan Barat pada lingkungan yang berbeda dengan mengetengahkan alasan keberhasilan mereka, variasi metode berusaha, organisasi dan kebijaksanaan perusahaan, keberhasilan yang berlain-lainan serta perbedaan dalam hubungan ekonomis dengan bangsa Asia tempat mereka bekerja. Satu dari kesimpulan mereka yang menarik adalah kelenturan (*flexibility*) dan kemampuan beradaptasi (*adaptability*) perusahaan tersebut terhadap perubahan yang terjadi di pasar dunia, dimungkinkan oleh adanya dukungan modal yang kuat, merupakan faktor utama keberhasilan usaha mereka. Barlow (1984) membuat penelitian serupa tentang industri karet di dua negara tiga puluh tahun kemudian, yang banyak dipengaruhi konsep Boeke tentang dualisme. Ia mencoba menganalisis sektor perkebunan rakyat dalam industri perkebunan karet dengan memperhitungkan faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi pola perkembangan yang sangat berbeda pada dua jenis perkebunan karet, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat, di Indonesia dan Malaysia, dengan mengetengahkan kompleksitas respon dari lingkungan pasar yang berbeda serta perubahan teknologi yang terjadi dari waktu ke waktu.

Penelitian penting tentang sumbangan ekonomi perkebunan terhadap perkembangan suatu daerah adalah Karya Thee Kian-wie (1977) tentang industri tembakau, karet, dan kelapa sawit di Sumatra Timur. Komoditas itu diusahakan dalam bentuk perkebunan dengan ciri yang sangat berbeda, skala besar dan padat modal, diusahakan di daerah dengan lingkungan sosial-ekonomis ketika tanah tersedia secara melimpah dan bisa diperoleh secara mudah, tetapi tenaga kerja sangat terbatas dan harus didatangkan dari daerah lain. Kebijakan upah buruh murah (*cheap labor policy*) dan larangan menguasai tanah yang dilaksanakan pengusaha Belanda di wilayah ini menutup kemungkinan bagi munculnya petani untuk mengusahakan tanaman ekspor. Corak dualistik inheren dalam sistem perkebunan di Sumatra Timur, baik secara teknologis maupun secara sosial, sungguh lebih tajam daripada apa yang ditemukan di Jawa. Thee Kin-wie menemukan bahwa jurang antara industri perkebunan karet raksasa dengan sektor perkebunan karet milik petani yang lemah berdampak pada perbedaan pertumbuhan regional yang timpang. Perusahaan besar dengan mudah bisa memperoleh lahan baru serta meningkat teknologinya, sementara petani kecil tidak pernah beringsut dari corak usaha mereka serta teknologi yang bersifat tradisional.

Apabila konflik agraris merupakan masalah utama penelitian Pelzer (1978) di Sumatra Timur, di daerah kerajaan isu tersebut tidak terlalu penting. Hal itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, kepadatan penduduk yang sudah relatif tinggi pada awal abad 19 di Jawa memaksa petani untuk mengusahakan tanah secara intensif, sedangkan di Sumatra Timur penduduk masih jarang sehingga mereka hidup dari bertani secara berpindah-pindah. Petani di Sumatra Timur diizinkan menggunakan lahan sesuai dengan panen tembakau sekali tanam bagi perusahaan tanaman pangan dengan *sistem jaluran*. Sistem ini diperlukan oleh perusahaan karena siklus rotasi tanaman selama 9 tahun ditengarai cocok sebagai cara optimal guna memperoleh kualitas tembakau istimewa. Kedua, petani di daerah kerajaan mempunyai tanah yang dialokasikan secara tetap, sekitar sepertiga bau yang diperoleh dari pemegang tanah apanage atau pengusaha Belanda. Sebaliknya, petani di Sumatra Timur adalah pe-

tani bebas sehingga apabila mereka akan bertani harus mengeluarkan usaha dan ongkos yang cukup besar untuk memotong dan membersihkan hutan. Setiap peluang yang ada akan mereka manfaatkan sebaik-baiknya, seperti pada zaman Pendudukan Jepang. Tekanan penduduk di Yogya-Solo mengakibatkan naiknya sistem bagi-hasil antara petani dan penyakap. Semakin kuat tekanan penduduk, semakin rumit sistem kontrak dalam penyakapan.

Satu hal yang menarik dalam penelitian Fasseur (1986) adalah bahwa penelitian ini bertolak belakang dengan jalan pikiran yang dianut banyak orang selama ini bahwa "STP adalah sekedar beban yang menambah berat pekerjaan petani di pedesaan Jawa, sebagai tambahan dari pajak tanah, tanpa adanya upah dari pekerjaan yang dilakukan petani". Dalam penelitiannya, Fasseur menekankan pentingnya sumbangan upah tanam (*plantloon*) pada daya beli masyarakat di suatu wilayah serta jumlah uang yang beredar pada masa diterapkannya STP. Meskipun bukti-bukti yang dikumpulkan di berbagai daerah di Jawa sejauh ini masih bervariasi, sekurang-kurangnya, STP "berhasil meningkatkan kesejahteraan, meskipun beban yang harus disangga oleh petani di Jawa tidak jauh berkurang". Interpretasi yang progresif terhadap pengaruh tanaman perdagangan pada kondisi sosial-ekonomi petani, terutama tanaman tebu pada masa STP, memaksa kita untuk memikirkan kembali asumsi lama bahwa dampak STP adalah hanya eksploitatif dan opresif. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa dampak sosial tanaman ini selalu positif pada penduduk setempat karena pada masa kemudian banyak daerah menjadi sedemikian tergantung pada tanaman itu dan terperangkap pada mekanisme kerjanya, dalam hal pengadaan tanah dan tenaga kerja, terutama pada masa Depresi. Bukti yang ditemukan Elson dan Knight menunjukkan bagaimana elit desa seperti petani kaya dan pamong desa bisa memetik keuntungan dari peranan yang mereka mainkan sebagai perantara dan kontraktor tenaga kerja antara perusahaan perkebunan dengan penduduk desa. Dalam hubungan ini, analisis mereka terhadap dinamika sosial-ekonomi industri gula berbeda secara mendasar dengan apa yang dikemukakan Geertz dalam *Agricultural Involution* yang menekankan pada kemiskinan yang terbagi - *shared poverty* - dan dampak sama-rata - *leveling*

*effect* industri gula. Meskipun demikian, Geertz adalah benar dalam mengingatkan kita bahwa masih perlu untuk menganalisis dampak berbagai tanaman terhadap organisasi sosial dan perkembangan di berbagai daerah lewat permintaan perusahaan atas tanah dan tenaga kerja pada berbagai lapisan atau kelompok masyarakat.

## 6. Kesimpulan

Dari uraian yang diketengahnya di atas, beberapa kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Perkembangan penulisan sejarah sosial-ekonomi Indonesia, yang muncul sejak dasawarsa 1970-an, telah menarik minat ahli ilmu- ilmu sosial dan sejarawan. Kecenderungan ini diharapkan terus dikembangkan pada masa datang karena banyak bidang yang menunggu untuk digarap.
2. Kajian sejarah sosial-ekonomis sangat relevan dengan upaya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemahaman yang baik terhadap masyarakat pedesaan merupakan modal dasar bagi suksesnya pembangunan.
3. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, terutama aspek teoretis dan metodologis, membuat kajian sejarah sosial-ekonomi semakin menarik. Ditambah lagi, sponsor yang tersedia secara luas akan semakin besar menyediakan peluang peneliti untuk terjun di dalam kegiatan ini.

## Daftar Pustaka

- Allen, G.C., and Donnithorne, A.G. 1968. *Western Enterprise in Indonesia and Malaya: A Study in Economic Development*. New York: Augustus M. Kelley.
- Barlow, C. 1984. "A Comparison of Factors Influencing Agricultural Development in Malaya and Indonesia, 1870-1940." Papar prepared for the Conference on "Economic Growth and Social Change in Indonesia, 1820-1940", Rijksuniversiteit Groningen, September 12-14.
- Benda, H.J. and Castle, L. 1969. "Samin Movement," *Bijdragen tot de Taal*,

- Land- en Volkenkunde*, Vol. 125, part 2, pp. 207-39.
- Boeke, J.H. 1948. *Ontwikkelingsgang en Toekomst van Bevolking- en Ondernemings Landbouw in Nederlands-Indie*. Leiden: E.J. Brill.
- Eijkman, A.J. dan Stapel, W.F. 1933. *Beknopt Leerboek de Geschiedenis van Nederlandsch-Indie*.
- Elson, R.E. 1982. "Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, 1830-1940. Unpublished Ph.D. Tesis, Monash University.
- Fasseur, C. 1986. "The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth-Century Java," in C.A. Bayly and D.H.A. Kolff, eds. *Two Colonial Empire Comparative Essays on the History of Indonesia and India in the 19<sup>th</sup> Century*. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
- Fernando, R. 1982. "Peasant and Plantation Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon Residency from the Cultivation System to the end of First Decade of the Twentieth Century." Unpublished Ph.D. thesis, Monash University.
- Frederick, W.H. 1978. "Indonesian Urban Society in Transition: Surabaya, 1926-1946." Unpublished Ph.D. thesis. University of Hawaii.
- Fruin-Mees, W. 1922-23. *Geschiedenis van Java*. 2 Vols. Weltevreden.
- Geertz, C. 1963. *Agricultural Involution: the Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Hussein Djajadiningrat. 1913. *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten; Bijdrage ter Kenschetsing van de Javaansche Geschiedhrijving*. Haarlem.
- Kahin, G. McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York.
- Knight, G.R. 1983. "The Peasantry and the Cultivation of Sugar Cane in Nineteenth Century Java. A Study of Pekalongan Residency, 1830-1870." Paper for Presentation to Conference on Indonesian Economic History in The Dutch Colonial Period, ANU, December 16-18, 1983.
- Kuntowijoyo. 1980. "Social Change in an Agrarian Society: Madura, 1850-1940." Unpublished Ph.D. thesis. Columbia University.
- Mandle, J. R. 1972. "The Plantation Economy: An Essay in Definition," *Science and Society*, Vol XXXVI, pp. 49-62.
- O'Malley, W.J. 1977. "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Yogyakarta in 1930's." Unpublished Ph. D. thesis. Cornell University.
- Ongkokham, 1975. "The Residency of Madiun: Priyayi dan Peasant in the Nineteenth Century." Unpublished Ph.D. thesis, Yale University.
- Pelzer, K.J., 1978. *Planter and Peasant*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- . 1982. *Planters Against Peasants: The Agrarian Struggle in East Sumatra 1947-1958*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Sartono Kartodirdjo. 1966. *The Peasants Revolt of Banten in 1888; Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movement in Indonesia*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- . 1973. *Protest Movements of Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in 19<sup>th</sup> and 20<sup>th</sup> Centuries*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Soegijanto Padmo. 1993. "Socio-economic History Trends in the Study on Indonesian History 1950-80's". Makalah disampaikan pada Simposium Humaniora, Linguistik, dan Sejarah, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta, 26-27 April 1993.
- Stoler, A.L. 1985. *Capitalism and Confrontation in Sumatrans Plantation Belt, 1870-1972*. New Haven: Yale University Press.
- Thee Kian-wie. 1977. *Plantation Agricultural and Economic Growth: An Economic History of East Sumatra, 1866-1942*. Jakarta: National Institute of Economic and Social Research.
- Van Leur, J.C. 1955. *Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History*. The Hague.